

# **IMPLEMENTASI KAMPUNG MODERASI BERAGAMA**

*(Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan)*



**OLEH:**

**ABD. SHAMAT**

**23200011057**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar**

***Master of Art (M.A)***

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies**

**Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik**

**Yogyakarta**

**2026**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-586/Un.02/DPPs/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : Implementasi Kampung Moderasi Beragama (Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABD. SHAMAT  
Nomor Induk Mahasiswa : 23200011057  
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Valid ID: 6a21fddda148

Ketua Sidang/Penguji I  
Prof. Fatimah, M.A., Ph.D.  
SIGNED



Valid ID: 6a1df295e694d

Penguji II  
Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A.  
SIGNED



Valid ID: 6a1ef51a066cc

Penguji III  
Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.  
SIGNED



Valid ID: 6a222dac911cd

Yogyakarta, 20 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana  
Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.  
SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd. Shamat

NIM : 23200011057

Jenjang : Megister

Prodi : Interdiciplenary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 April 2026

Saya yang menyatakan,



ABD. SHAMAT  
NIM: 2320001/1057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Shamat

NIM : 23200011057

Jenjang : Magister

Program studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsetrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Mei 2026

yang menyatakan



*Abd Shamat*  
Abd Shamat

NIM: 23200011057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul **Implementasi Kampung Moderasi Beragama Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan** ditulis oleh:

Nama : Abd Shamat  
NIM : 23200011057  
Jenjang : Magister  
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar *Magister of Art (M.A)*.

Dengan ini kami berharap agar tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 April 2026

Pembimbing,



Ahmad Norma Permata, S.Ag., Ph. D. M.A  
NIP. 1971207 200901 1 003

## ABSTRAK

Fenomena ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi antarumat beragama menjadi tantangan serius dalam menjaga keutuhan negara dan harmoni sosial masyarakat. Kondisi tersebut juga terjadi di Pamekasan yang memiliki budaya religius (*Ahlussunnah wal Jamaah*) yang kuat. Pamekasan khususnya dalam beberapa tahun terakhir, menghadapi berbagai peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama, seperti perusakan tempat wisata dan konflik perbedaan pemahaman keagamaan. Dalam merespons situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, menginisiasi kebijakan Kampung Moderasi Beragama, untuk memperkuat nilai toleransi, kerukunan umat beragama.

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kampung Moderasi Beragama di Kabupaten Pamekasan, dari aspek mekanisme implementasi, serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut mampu mendorong terciptanya masyarakat yang toleran dan harmonis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), analisis implementasi kebijakan George C. Edward III penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi Kampung Moderasi Beragama di Kabupaten Pamekasan, merupakan langkah strategis dalam memperkuat nilai toleransi dan mencegah berkembangnya paham ekstremisme di tingkat lokal. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui sosialisasi moderasi beragama, dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat sebagai aktor utama dalam membangun harmoni sosial. Namun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya dan kuatnya pengaruh pemahaman keagamaan yang konservatif, serta implementasi kebijakan masih di ranah administratif dan sosialisasi nilai moderasi agama itu sendiri.

**Kata Kunci:** *Implementasi Kebijakan, Moderasi Beragama, Kampung Moderasi Beragama.*

**MOTTO**

**Life is Short, So Enjoy Your Life**

*“Hidup ini Singkat, Jadi Nikmati Hidupmu”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak dan Ibu serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi dalam mengiringi perjalanan saya selama ini.

Sege nap keluarga besar Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA) Yogyakarta yang telah memberikan ruang atau tempat sehingga saya bisa hidup dan mencari ilmu di Kota Yogyakarta.

Kepada jajaran sivitas akademika, Program *Studi Interdisciplinary Islamic Studies* akademik, Dosen Pembimbing Tesis dan Dosen konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih, serta penulis sudah diberikan sehat jasmani dan rohani untuk menyelesaikan tulisan ini, sebab tanpa hal itu mungkin tulisan ini tidak akan bisa terselesaikan, *shalawat* serta salam saya sampaikan pada Nabi Muhammad SAW yang sudah menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah.

Tesis yang sangat singkat ini, hanya sebatas tetesan embun dalam samudra keilmuan, meski tulisan ini sangat sederhana, namun banyak pihak yang pantas penulis sampaikan terima kasih, baik dalam membangun gagasan serta dorongan untuk terus menyelesaikan tulisan ini sampai akhir. Penulis menyadari, bahwa tanpa karunia Allah SWT Penulis tidak akan dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Implementasi Kampung Moderasi (Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan)*” Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S. Ag., M.A., M.Phil., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S. Ag., MA selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak H. Ahmad Rafiq S.Ag., M.Ag., M.A., Ph. D selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan dan dorongan kepada penulis untuk menyusun tesis ini.
4. Bapak Najib Kailani, S. Fil.I., M.A., Ph.D. Selaku ketua Program studi Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Ibu Dr. Subi Nur Isnaini, L. c., M.A Selaku sekretaris Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah memberikan arahan akademik dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Ahmad Norma Permata, S. Ag., M.A., Ph. D selaku pembimbing tesis yang telah sudi menemani peneliti menyelesaikan tulisan ini, dengan kritik konstruktif serta masukan dan dorongan semangat untuk terus menyelesaikan tulisan ini sampai akhir.
7. Kepada bapak dan Ibu yang selalu memberikan semangat, mengajarkan kesabaran serta keikhlasan mulai awal kuliah sampai tahap tesis ini.
8. Kepada saudara dan keluarga yang telah memberi motivasi dan ketabahan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga tesis ini selesai.
9. Kepada segenap teman seperjuangan, mulai dari awal penulis menginjakkan kaki pertama kali di Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

10. Kepada semua teman Jurusan yang telah mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini, terima kasih sudah menjadi teman baik selama di Yogyakarta.

11. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya sejak dari awal penyusunan hingga selesainya tesis ini. Semoga Allah SWT melimpahkan segala kebaikan kepada mereka. Aamiin.

Mungkin dalam hal ini, penulis hanya mampu memberikan rasa terima kasih, pada nama-nama yang peneliti tulis di atas, semoga Tuhan membalasnya dengan lebih baik, tidak lupa pula bagi kehidupan yang telah mengajarkan penulis tentang perjuangan hidup. sekian dari penulis, *jazakumullah ahsanal jaza*.

Yogyakarta, 22 April, 2026.

ABD. SHAMAT  
NIM:23200011057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>PERNYAAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat.....	13
D. Telaah Pustaka.....	15
E. Kerangka Teori.....	20
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Pembahasan.....	35
<b>BAB II</b>	
<b>Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan</b> .....	37
A. Struktur Sosial Kota Pamekasan.....	37
B. Sejarah dan Politik Pemerintahan.....	40
C. Pamekasan Dalam Angka.....	46
D. Karakteristik Masyarakat Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Pamekasan.....	49
E. Ekstremisme Agama di Pamekasan.....	52
<b>BAB III</b>	
<b>Kebijakan Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Pamekasan</b> .....	57
A. Genealogi Kebijakan Moderasi Beragama.....	57
B. Kampung Moderasi Beragama.....	62

C. Implementasi Kebijakan Kampung Moderasi Beragama di Pamekasan... 66

**BAB IV**

**Analisis Implementasi Kampung Moderasi Beragama di Pamekasan ..... 79**

A. Agenda Kebijakan Kampung Moderasi Beragama ..... 79

B. Mekanisme Implementasi Kebijakan Kampung Moderasi Beragama .....

**BAB V**

**PENUTUP..... 96**

A. Kesimpulan..... 96

B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan dan semakin sadarnya umat manusia untuk hidup bersama, justru menghadapi tantangan yang cukup serius, yaitu lahirnya paham ekstremisme, radikalisme, eksklusivisme, dan intoleransi yang seakan melegalkan kekerasan atas nama perbedaan.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara yang majemuk, dengan keberagaman ras, budaya, dan agama, juga tidak terlepas dari ancaman intoleransi dan radikalisme yang sering kali berujung pada tindakan ekstremisme sebagai jalan penyelesaian terhadap berbagai perbedaan.

Keberagaman dan perbedaan yang seharusnya menjadi karunia Sang Pencipta untuk dinikmati bersama, justru kerap memicu tindakan anarkis atas nama perbedaan. Menurut Yulisman gejala kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat plural dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, adanya cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan yang ekstrem serta berlebihan. Pemahaman tersebut dapat mendorong seseorang untuk bertindak tanpa memperhatikan martabat kemanusiaan. *Kedua*, munculnya klaim kebenaran subjektif yang menganggap diri atau kelompoknya sebagai pihak yang paling benar secara mutlak. *Ketiga*, adanya

---

<sup>1</sup> Shinta Dewi Rismawati dkk., “The Legal Politics Of Religious Moderation In Indonesia: Responsive Or Repressive?” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 4 (2021), hlm. 1, <https://www.abacademies.org/articles/the-legal-politics-of-religious-moderation-in-indonesia-responsive-or-repressive-10805.html>.

penafsiran terhadap sumber ajaran agama yang tidak selaras dengan semangat nasionalisme.<sup>2</sup>

Praktik kehidupan beragama di Indonesia yang sangat beragam, mulai dari perbedaan keyakinan, aliran keagamaan, hingga organisasi keagamaan, sering kali disertai dengan anggapan bahwa cara pandangnya sendiri yang paling benar. Kondisi tersebut dapat menjadi ancaman terhadap keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah pada masyarakat pedesaan yang selama ini dikenal memiliki nilai kebersamaan yang kuat. Menurut Ruslan, pandangan yang demikian dapat membawa umat beragama ke dalam jurang konflik serta menimbulkan korban yang didasarkan atas perbedaan.<sup>3</sup>

Secara umum, Pulau Madura selalu menarik perhatian para peneliti, terutama dalam kajian sosial-keagamaan. Meskipun berbagai penelitian telah banyak dilakukan, dinamika keberagaman di Madura terus menunjukkan perkembangan yang cukup kompleks dan beragam, mulai dari relasi agama dan politik, otoritas keagamaan, hingga munculnya paham ekstremisme yang belakangan menjadi isu penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemunculan paham tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan cara pandang keagamaan yang cenderung fundamentalis dan eksklusif, sehingga dalam

---

<sup>2</sup> Alya Nurayu Sulisman dan Titi Stiawati, *"The Imperative Of Establishing Kampung Moderasi Beragama As A Strategy For Neighborhood-Based Community Empowerment,"* *Komunitas* 14, no. 2 (29 Desember 2023), hlm. 126–27, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v14i2.9023>.

<sup>3</sup> Idrus Ruslan, *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2020), hlm. 2–3.

praktiknya sering memunculkan sikap intoleran, klaim kebenaran sepihak, serta sentimen keagamaan yang berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik sosial di tengah masyarakat.<sup>4</sup>

Selama dua dekade terakhir, perkembangan paham ekstremis dan intoleran di wilayah Madura, menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Fenomena tersebut terlihat dari menguatnya narasi keagamaan yang bersifat eksklusif, serta meningkatnya tindakan diskriminatif, terhadap kelompok yang dianggap berbeda, baik dalam aspek keyakinan, budaya, maupun pandangan politik. Di beberapa daerah di Madura, paham tersebut mulai memengaruhi pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, melalui berbagai saluran, seperti media sosial, ceramah keagamaan yang bersifat radikal, dan organisasi tertentu. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kerukunan, toleransi, serta keutuhan sosial dan budaya bangsa Indonesia.

Pamekasan yang merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang mayoritas penduduknya beragama Islam, meyakini bahwa ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jamaah* sebagai landasan moral kehidupan (*way of life*). Oleh sebab itu, perilaku moral yang berlandaskan nilai-nilai *Ahlussunnah wal Jamaah* menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Pamekasan. Namun, perkembangan paham ekstremis dan intoleran berlangsung cukup pesat khususnya di Kabupaten Pamekasan, sehingga kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Fenomena tersebut menjadi salah satu indikator munculnya tindakan kekerasan atas

---

<sup>4</sup> Mukhammad Zamzami, Nur Hidayat Wakhid Udin, dan Ahmad Fathan Aniq, “*From Religious Symbolism to Authoritarianism Abd A’la*” 12, no. 02 (2018), hlm. 159.

nama agama dan sekaligus menjadi fenomena baru di tengah kehidupan masyarakat secara umum.

Paham ekstremis dan intoleran termanifestasikan dalam beberapa kasus yang belakangan ini terjadi, seperti kasus pembakaran tempat wisata Bukit Bintang, diduga tempat wisata tersebut dijadikan tempat maksiat serta mencederai tradisi lokal,<sup>5</sup> Aksi main hakim sendiri dan perusakan fasilitas umum merupakan tindakan yang sangat disayangkan. Pada kenyataannya, keberadaan objek wisata Bukit Bintang sudah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, terutama bagi para pedagang makanan dan minuman yang memperoleh manfaat secara langsung dari aktivitas wisata tersebut.

Selain itu, terdapat pula konflik keyakinan yang tidak kalah penting untuk dijelaskan, yaitu penolakan masyarakat yang mengatasnamakan GESPER (Gerakan Santri dan Pemuda Rahmatan lil Alamin) terhadap paham Wahabi-Salafi yang dianggap telah memengaruhi cara berpikir penganut *Ahlussunnah wal Jamaah* di Pamekasan.<sup>6</sup> Menurut Abd A'la, sikap intoleransi yang terjadi di Madura secara umum, dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang disampaikan oleh sebagian ulama yang tergabung dalam organisasi AUMA (Aliansi Ulama Madura) dan FKM (Forum Kiai Muda). Kedua organisasi tersebut dinilai cenderung mengusung pandangan keagamaan yang ekstrem, radikal, dan intoleran. Kondisi tersebut,

---

<sup>5</sup> “Ribuan Warga Rusak dan Bakar Lokasi Wisata di Pamekasan, Ini Faktanya,” diakses 18 Desember 2024, <https://regional.kompas.com/read/2020/10/05/15450001/ribuan-warga-rusak-dan-bakar-lokasi-wisata-di-pamekasan-ini-faktanya>.

<sup>6</sup> Ali Topan, “Potret Kehidupan Umat Beragama (Studi Kasus Penolakan Wahabi-Salafi di Pamekasan Madura 2010—2023),” Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial 6, no. 1 (2024): 67–68, <https://doi.org/10.19105/ejpis.v6i1.12589>.

menurutnya, turut berkontribusi terhadap munculnya berbagai kasus ekstremis di Madura.<sup>7</sup>

Pada beberapa tahun belakangan ini yaitu pada tahun 2023, juga terjadi aksi ekstremis yang mengatasnamakan agama, yaitu pembakaran *café* Moga Jaya berlokasi di Jalan Gatotkaca. Menurut Abdul Aziz selaku koordinator lapangan, aksi pembakaran dan perusakan terhadap kafe tersebut, dilakukan karena *café* Moga Jaya diduga dijadikan tempat prostitusi, serta menjual minuman keras yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>8</sup> Menurut beberapa pakar aksi radikalisme dan ekstremis di Indonesia terutama di Kabupaten Pamekasan, disebabkan oleh ketiadaan gerakan moderat-progresif yang mencoba mengcounter, paham ekstremisme masuk, sehingga menimbulkan berbagai macam kegaduhan.<sup>9</sup>

Benang merah yang dapat diambil dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Pamekasan, baik di wilayah pesisir maupun perkotaan, selama beberapa dekade terakhir bukanlah konflik antaragama, melainkan konflik yang berkaitan dengan perbedaan pemahaman terhadap sumber ajaran agama. Norma Permata dalam penelitiannya yang berjudul Muslim dan Kristen di Surakarta, mengungkapkan bahwa konflik yang sering terjadi di Indonesia pada dasarnya bukan konflik antaragama, tetapi lebih disebabkan oleh

---

<sup>7</sup> Abd A'la dan Ahwan Mukarrom, "Power-Knowledge Relations of The Elder and The Younger Madurese Muslim Scholars in Propagating Islamism in Madura: A Counter-Narrative," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 10, no. 1 (2020): 149, 1, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2020.10.1.81-109>.

<sup>8</sup> "Ratusan Warga Rusak dan Bakar Kafe di Pamekasan," diakses 18 Desember 2024, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6920762/ratusan-warga-rusak-dan-bakar-kafe-di-pamekasan>.

<sup>9</sup> M. Khusna Amal, "The Role of Islamic Religious Higher Education in the Revitalization of Religious Moderation in Indonesia," *Dialogia* 19, no. 2 (2021): 295, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v19i2.3327>.

perbedaan pemahaman dalam menafsirkan teks-teks suci keagamaan. Perbedaan tersebut, misalnya terlihat dalam pertentangan antara kelompok tradisional dan modernis yang kerap memiliki penafsiran berbeda terhadap ajaran agama.<sup>10</sup>

Ulama atau Kiai di Madura pada dasarnya memiliki peran ganda, yaitu sebagai tokoh agama dalam aspek spiritual, sekaligus sebagai pemimpin masyarakat dalam ranah sosial dan politik. Peran tersebut menjadikan Ulama atau Kiai sebagai figur yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat Madura. Kondisi masyarakat Madura yang mayoritas beragama Islam, menempatkan Ulama sebagai pemegang figur otoritatif dalam merumuskan paham keagamaan, sehingga mereka mempunyai potensi dalam upaya menangkal radikalisme dan ekstremisme. Abd A'la juga mengungkapkan bahwa hubungan antara masyarakat Madura dan ulama dapat diibaratkan sebagai hubungan patron-klien. Dalam hubungan tersebut, ulama yang memiliki kharisma sebagai patron mampu memengaruhi masyarakat sebagai *klien*, baik dalam aspek spiritual maupun dalam kehidupan sosial dan politik.<sup>11</sup>

Sikap intoleransi yang sering terjadi di Pamekasan khususnya dan Madura secara umum, disebabkan oleh berbagai faktor, rendahnya pendidikan dan menguatnya paham konservatif, menyebabkan agresivitas beragama dan melahirkan kekerasan atas nama agama. Menurut Fahrudin bahwa penyebab utama kekerasan atas nama agama di Pamekasan, dilatarbelakangi oleh pemahaman

---

<sup>10</sup> Ahmad-Norma Permata, "Muslim Dan Kristen Di Surakarta: Kajian Sosiologis Hubungan Antar-Agama," 1, diakses 28 Mei 2025, <https://www.academia.edu/2969062>.

<sup>11</sup> A'la dan Mukarrom, "Power-Knowledge Relations of The Elder and The Younger Madurese Muslim Scholars in Propagating Islamism in Madura," 127–28.

masyarakat yang cenderung konservatif, serta minimnya sosialisasi sikap toleransi beragama dari berbagai elemen, seperti tokoh masyarakat dan Kementerian Agama Pamekasan.<sup>12</sup>

Masyarakat Kabupaten Pamekasan memiliki kekayaan budaya, keragaman pemahaman keagamaan, serta tradisi Islam tradisional yang kuat. Namun, di tengah kondisi tersebut, muncul berbagai penafsiran agama yang berbeda dan cenderung ekstrem, sehingga berpotensi memicu kekerasan atas nama agama. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh masih minimnya sosialisasi moderasi beragama di tengah masyarakat. Akibatnya, paham fundamentalisme agama berkembang semakin subur dan berpotensi mengganggu kerukunan umat beragama dalam kehidupan sosial.<sup>13</sup>

Dari berbagai macam kasus dan variasi kekerasan atas nama agama, pemerintah melalui Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, menginisiasi kebijakan Kampung Moderasi Beragama (KMB), sebagai bentuk implementasi Surat Dirjen Bimas Islam Nomor 137 Tahun 2023.<sup>14</sup> Kampung Moderasi Beragama (KMB) merupakan salah satu solusi yang diinisiasi pemerintah, untuk merespons berbagai tindakan kekerasan atas nama agama yang kerap terjadi di masyarakat. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang damai, harmonis, dan

---

<sup>12</sup> Ahmad Hanif Fahrudin dkk., “Pembinaan Kampung Moderasi Beragama di Desa Tokerbuy Pamekasan Madura,” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 5 (12 September 2024): 8585, <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.34283>.

<sup>13</sup> Athoillah Islamy dan Adib Susilo, “*Kosmopolitanisme Islam Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia*,” *Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (30 Desember 2022), hlm. 78. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i2.412>.

<sup>14</sup> “*Perintisan Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Pamekasan*,” diakses 21 Oktober 2024, <https://kemenagpamekasan.com/perintisan-kampung-moderasi-beragama-kabupaten-pamekasan>.

saling menghormati antar kelompok masyarakat. Melalui penguatan nilai-nilai moderasi beragama, diharapkan terbentuk tatanan sosial yang menjunjung tinggi toleransi, kemanusiaan, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.

Program Kampung Moderasi Beragama yang diagendakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, melalui Bimbingan Masyarakat (BIMAS) sebagai *leading sector*, membagi wilayah Kabupaten Pamekasan ke dalam empat zona pelaksanaan. *Pertama*, zona selatan yang meliputi Kecamatan Pamekasan, Tlanakan, dan Proppo. *Kedua*, zona barat yang mencakup Kecamatan Pegantenan, Palengaan, dan Pakong. *Ketiga*, zona utara yang terdiri atas Kecamatan Waru, Batumarmar, dan Pasean. *Keempat*, zona timur yang meliputi Kecamatan Pademawu, Galis, Larangan, dan Kadur. Pembagian zona tersebut dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan program moderasi beragama agar berjalan lebih efektif dan terarah sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat di masing-masing wilayah.<sup>15</sup>

Pentingnya menanamkan nilai toleransi kepada masyarakat, mendorong Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, untuk menyatukan umat beragama, program tersebut baru terealisasi di desa Sokolelah dan desa Samatan pada tahun 2024, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendorong kerukunan umat

---

<sup>15</sup> Ach Syafiq Fahmi dkk., “*Kampung Moderasi Beragama Polagan: Strategi Mewujudkan Masyarakat Moderat Di Pamekasan*,” Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan 5, no. 1 (29 November 2024), hlm. 44–45, <https://doi.org/10.53491/porosonim.v5i1.1198>.

beragama, serta menghindari ekstremisme dalam beragama yang sering kali terjadi di Madura umumnya Pamekasan khususnya.<sup>16</sup>

Kebijakan moderasi beragama yang diusung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan upaya preventif untuk mengantisipasi berkembangnya paham radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang belakangan menjadi isu global. Moderasi beragama hadir sebagai pendekatan yang mengajak umat beragama untuk bersikap inklusif, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan keyakinan, budaya, serta agama. Melalui sikap tersebut, diharapkan tafsir keagamaan yang bersifat ekstrem tidak berkembang dan merusak nilai-nilai keberagaman dalam kehidupan bersama.<sup>17</sup>

Dalam Program Kampung Moderasi Beragama, masyarakat didorong untuk menghargai perbedaan dan mencari persamaan nilai di tengah keberagaman agama. Dialog, kerja sama, dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kehidupan yang inklusif dan harmonis. Namun, dalam praktik kehidupan beragama di Indonesia, masih terdapat beberapa organisasi masyarakat yang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, karena menganggap kelompoknya paling benar dibandingkan kelompok lain. Sikap tersebut dapat memicu intoleransi dan merusak nilai-nilai kemanusiaan serta keberagaman.

---

<sup>16</sup> “Kemenag Pamekasan Mengembangkan dan Memperkuat Kampung Moderasi,” diakses 21 Oktober 2024, <https://kemenagpamekasan.com>.

<sup>17</sup> Annisa Nurul Jannah dan Muhammad Turhan Yani, “Aktualisasi Moderasi Beragama Sebagai Wujud Semangat Bhinneka Tunggal Ika Pada Masyarakat Multietnis Di Kampung Ampel, Kota Surabaya,” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 2, no. 2 (23 Juli 2023): 2, <https://doi.org/10.572349/relinesia.v2i2.698>.

Keyakinan yang menganggap kelompok sendiri paling benar, muncul akibat pemahaman agama yang sempit dan tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap tersebut dapat mendorong seseorang mudah menyalahkan kelompok lain dan memicu intoleransi. Oleh karena itu, agama memiliki peran penting sebagai penguat tatanan sosial, untuk menjaga kehidupan yang harmonis dan keutuhan Negara Indonesia. Selain memberikan pemahaman tentang moderasi beragama, masyarakat juga perlu menyadari bahwa perdamaian merupakan nilai utama yang terkandung dalam ajaran setiap agama.<sup>18</sup>

Kajian tentang moderasi beragama di Indonesia telah banyak dilakukan, baik secara normatif, konseptual, maupun melalui studi kasus. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Dewi Rismawati dkk. Menekankan bahwa kebijakan moderasi beragama di Indonesia bersifat responsif dan partisipatif, dalam menjaga stabilitas nasional. Sementara itu, dalam konteks lokal Madura, penelitian Ifa Nurhayati membahas pembinaan Kampung Moderasi Beragama, melalui sosialisasi kepada tokoh masyarakat serta pemanfaatan media sosial, sebagai sarana penyebaran nilai-nilai moderasi beragama. Penelitian lain yang relevan akan dijelaskan lebih rinci pada bab berikutnya.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini, bukan semata-mata karena adanya kasus intoleransi dan konflik berbasis agama, melainkan karena daerah Pamekasan memiliki karakter sosial-keagamaan yang khas dan kompleks. Sebagai

---

<sup>18</sup> Ahmad Hanif Fahrudin dkk., “Pembinaan Kampung Moderasi Beragama Di Desa Tokerbuy Pamekasan Madura,” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 5 (2024), hlm. 84–89, <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.34283>.

masyarakat yang dikenal religius, dengan pengaruh Kiai dan lembaga pesantren yang sangat kuat, hal ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan lokal memiliki posisi yang sangat dominan, dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat.

Kebijakan Kampung Moderasi Beragama (KMB) bersifat *top-down*, yakni dirumuskan oleh pemerintah pusat dan diimplementasikan hingga tingkat desa, melalui Kantor Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Hal ini menjadi sangat menarik, sebab implementasi kebijakan yang memiliki struktur sosial-keagamaan yang kuat seperti Pamekasan, tentu tidak dapat dipahami hanya sebagai proses administratif semata, melainkan juga sebagai proses negosiasi sosial antara negara, aktor agama, dan masyarakat lokal.

Pada dasarnya keberhasilan suatu kebijakan publik, tidak hanya ditentukan oleh baiknya desain kebijakan, namun juga ditentukan oleh kemampuan kebijakan tersebut diterjemahkan, diterima, dan dijalankan dalam realitas sosial masyarakat. Dalam konteks ini, sangat mungkin terjadi kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan, dengan praktik implementasi di lapangan. Program Kampung Moderasi Beragama dapat saja dipahami berbeda oleh masyarakat, dijalankan secara formalitas administratif, atau bahkan menghadapi resistensi sosial akibat perbedaan pemahaman keagamaan dan budaya lokal yang kuat.

Sedangkan penelitian tentang moderasi beragama selama ini, cenderung lebih banyak menempatkan moderasi sebagai konsep normatif dan gerakan sosial-keagamaan, sementara kajian yang secara khusus melihat moderasi beragama,

sebagai objek implementasi kebijakan publik di tingkat lokal masih relatif terbatas. Padahal, implementasi kebijakan merupakan tahap paling krusial dalam proses kebijakan publik, sebab pada tahap inilah suatu kebijakan diuji efektivitasnya dalam menyelesaikan persoalan sosial yang menjadi target kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Kampung Moderasi Beragama dijalankan di Kabupaten Pamekasan, bagaimana aktor-aktor lokal merespons kebijakan tersebut. Dengan menelusuri latar belakang, proses implementasi, penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana KMB berfungsi sebagai instrumen efektif dalam membangun kohesi sosial dan menanggulangi potensi konflik keagamaan di tingkat lokal.

Penelitian ini dapat berkontribusi, dalam menganalisis implementasi kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif. Dengan mempelajari bagaimana kebijakan KMB diterapkan, penelitian ini dapat membantu memperkuat nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama yang sangat penting dalam masyarakat majemuk. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, lebih lanjut mengenai moderasi beragama, serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin perlu diatasi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa agenda kebijakan Kampung Moderasi Beragama?

2. Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan Kampung Moderasi Beragama?
3. Sejauh mana program Kampung Moderasi Beragama telah dijalankan?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Fokus utama dalam penelitian ini, yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang kebijakan Kampung Moderasi Beragama di tingkat lokal, serta pentingnya moderasi beragama dalam menjaga harmoni sosial. Dari deskripsi tersebut peneliti mencoba mengategorikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis agenda strategis yang diusung dalam kebijakan Kampung Moderasi Beragama, sebagai upaya membangun masyarakat yang toleran dan inklusif.
  - b. Untuk mengkaji mekanisme implementasi kebijakan Kampung Moderasi Beragama di tingkat lokal, termasuk peran aktor-aktor kunci, seperti tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah.
  - c. Untuk mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan, implementasi Program Kampung Moderasi Beragama.
  - d. Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan, guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Kampung Moderasi Beragama di masa mendatang.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, penulis mengategorikan pada dua aspek penting dalam penelitian, sebagaimana berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai moderasi beragama, sebagai konsep sosial dan sebagai bentuk evaluasi kebijakan publik berbasis moderasi beragama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menawarkan model baru terkait penerapan konsep moderasi beragama oleh pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kesadaran moderasi di tengah keberagaman agama.

### b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini, adalah memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, dalam memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan moderasi beragama, serta merumuskan strategi yang lebih efektif, untuk mendorong kerukunan umat beragama. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak Kementerian Agama, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan, dalam memperkuat pelaksanaan program Kampung Moderasi Beragama di tengah masyarakat.

#### D. Telaah Pustaka

Dari sedikit literatur yang penulis temukan, serta berhubungan dengan tema yang penulis angkat dalam penelitian ini, penulis mencoba mengategorikannya pada tiga aspek sebagaimana berikut:

##### 1. Aspek Kebijakan Moderasi Beragama

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Shinta Dewi Rismawati, Siti Qomariyah, Happy Sista Devy, Nurul Maisyal, dan Qurrota A'yun berjudul "*The Legal Politics of Religious Moderation in Indonesia: Responsive or Repressive?*". Penelitian tersebut menemukan bahwa hubungan antara agama dan negara bersifat simbolis-mutualistik. Selain itu, kebijakan moderasi beragama di Indonesia dinilai responsif dan partisipatif, karena menekankan pentingnya moderasi beragama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara.<sup>19</sup>

##### 2. Aspek Sosialisasi Moderasi Beragama

*Pertama* yaitu jurnal yang ditulis oleh M. Khusna Amal yang berjudul "*The Role of Islamic Religious Higher Education in the Revitalization of Religious Moderation in Indonesia*". Penelitian ini mencoba melihat peran perguruan tinggi Islam, untuk mensosialisasikan moderasi beragama, dari sebelum dan sesudah reformasi. Khusna Amal menemukan bahwa PTKI merupakan institusi Islam yang konsisten, dalam

---

<sup>19</sup> Shinta Dewi Rismawati dkk., "*The Legal Politics Of Religious Moderation In Indonesia: Responsive Or Repressive?*," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 4 (2021): 4, <https://www.abacademies.org>.

memperjuangkan agenda moderasi beragama. Bahkan sampai saat ini PTKI masih aktif mengajarkan, mengampanyekan dan meneguhkan moderasi beragama dalam kontestasinya dengan kelompok-kelompok Islam politik radikal.<sup>20</sup>

*Kedua* yaitu jurnal yang ditulis oleh Ifa Nurhayati yang berjudul "*Pembinaan Kampung Moderasi Beragama pada Masyarakat Pesisir di Madura.*" Secara umum, dalam penelitiannya penulis menemukan, bahwa sosialisasi kampung moderasi beragama disosialisasikan kepada tokoh masyarakat, kepala desa, serta mengupayakan media sosial, sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu memberikan data kuantitatif tentang dampak program moderasi beragama, serta fokus penelitian yang masih terlalu luas dan tidak fokus pada satu tempat.<sup>21</sup>

*Ketiga* Jurnal yang ditulis oleh Salamatul Maufiroh, dengan judul "*Implementasi Nilai Moderasi dalam Praktik Pembangunan Wisata Religi Batu Ampar di Pamekasan*". Kajian tersebut difokuskan pada nilai-nilai moderasi beragama yang berada di objek wisata religi Batu Ampar Pamekasan. Maufiroh menemukan dalam penelitiannya, bahwa tempat wisata Batu Ampar, menjadi contoh praktik toleransi beragama, sebab tempat wisata tersebut terbuka untuk semua penganut agama. Kekurangan

---

<sup>20</sup> Amal, "*The Role of Islamic Religious Higher Education in the Revitalization of Religious Moderation in Indonesia.*"

<sup>21</sup> Ifa Nurhayati dkk., "*Pembinaan Kampung Moderasi Beragama Pada Masyarakat Pesisir Di Madura,*" *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5 (2023): 9922–26, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/20845>.

dalam penelitian ini, yaitu terkait sumber terpercaya, sebab peneliti belum menjelaskan secara jelas terkait responden dari teknik wawancara yang dilakukan.<sup>22</sup>

Keempat jurnal yang berjudul “*The Role Of The Religious Youth Harmony Forum (FKPUB) In Improving Local Wisdom-Based Religious Moderation In Pamekasan City*” ditulis oleh Andri Sutrisno dan Fitrah Sugiarto. Melalui pendekatan interaksi sosial dengan fokus pada FKPUB, penguatan nilai-nilai kearifan lokal seperti *rembhek* (musyawarah) dan *rampa’ naong baringin korong* (naungan pohon beringin), sebagai upaya dalam meningkatkan toleransi dan kerja sama antarumat beragama di kabupaten Pamekasan.<sup>23</sup>

### 3. Aspek Strategi Penguatan Moderasi Beragama

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ach. Syafik Fahmi, berjudul “*Kampung Moderasi Beragama Polagan: Strategi Mewujudkan Masyarakat Moderat di Pamekasan*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan strategi yang dilakukan di desa Polagan, melalui dialog interaktif agama, majelis taklim dan Santunan Anak Yatim. Kekurangan dari penelitian yaitu *riset method* yang belum jelas, *novelty* yang menjelaskan

---

<sup>22</sup> Salamatul Maufiroh, Mohammad Ali Al Humaidy, dan Harisah Harisah, “*Implementasi Nilai Moderasi Dalam Praktek Pembangunan Wisata Religi ‘Batu Ampar’ Di Pamekasan*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (9 November 2024): 2982–88, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14926>.

<sup>23</sup> Andri Sutrisno dan Fitrah Sugiarto, “*The Role Of The Religious Youth Harmony Forum (Fkpub) In Improving Local Wisdom-Based Religious Moderation In Pamekasan City*,” *Khatulistiwa* 12, no. 1 (28 Oktober 2022), hlm. 37–56, <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v12i1.2290>.

kebaruan, sehingga penelitian yang dilakukan cenderung informatif, serta penelitian yang terkesan *engagement*.<sup>24</sup>

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Abd Hannan, berjudul “Penguatan Moderasi Beragama di Madura melalui Jejaring Sosial Keagamaan Pesantren”. Jurnal tersebut membahas pentingnya peran pesantren, dalam memperkuat moderasi beragama di Madura. Temuan dari penelitian ini, yaitu pesantren melalui Kiai dan santri berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang bisa memengaruhi cara berpikir masyarakat, dalam memperkuat nilai moderasi. Kekurangan yaitu keterbatasan penelitian pada analisis literatur tanpa data lapangan langsung, sehingga membatasi validitas kondisi di lapangan yang sebenarnya.<sup>25</sup>

Ketiga yaitu jurnal yang berjudul “*Strengthening Religious Moderation Among the People of Madura through Religious Mentoring Activities Based on Local Wisdom*”. Ditulis oleh Saiful Hadi, dalam penelitiannya Saiful Hadi menemukan, bahwa Moderasi beragama di Madura secara umum, perlu pendekatan moderasi agama yang berbasis budaya tradisional (*local wisdom*), dengan memanfaatkan pesantren sebagai agen moderasi beragama dan upaya mendukung penguatan moderasi, sebab

---

<sup>24</sup> Ach Syafiq Fahmi, Mohammad Ali Al Humaidy, dan Sahrul Romadhon, “Kampung Moderasi Beragama Polagan: Strategi Mewujudkan Masyarakat Moderat Di Pamekasan,” POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan 5, no. 1 (2024), hlm. 41–52, <https://www.e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim/article/view/1198>.

<sup>25</sup> Abd Hannan, “Penguatan Moderasi Beragama Di Madura Melalui Jejaring Sosial Keagamaan Pesantren,” Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora 8, no. 1 (1 Juni 2022): hlm. 30–59, <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v8i1.175>.

pendampingan berbasis kearifan lokal menunjukkan potensi besar dalam memperkuat sikap moderat.<sup>26</sup>

Berdasarkan temuan penelitian yang sudah diuraikan di atas, kebaruan (*novelty*) penelitian ini, bisa dilihat dari berbagai aspek, di antaranya lokasi penelitian, pendekatan penelitian, dan fokus dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini secara spesifik mengambil konteks lokal Kabupaten Pamekasan, dengan fokus pada implementasi *Kampung Moderasi Beragama (KMB)* di tingkat desa, serta dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota. Sedangkan penelitian terdahulu masih bersifat umum, tidak terfokus pada satu wilayah tertentu atau implementasi dan regulasi yang dibawakan oleh Kementerian Agama.

Pada aspek teoretis, penelitian yang dilakukan ini, tidak hanya melihat moderasi beragama sebagai wacana normatif atau gerakan sosial yang dimotori oleh Kementerian Agama Kota, namun penelitian ini mencoba menempatkan dalam kerangka analisis implementasi kebijakan publik, khususnya sebagai turunan dari regulasi formal, berupa Surat Dirjen Bimas Islam Nomor 137 Tahun 2023 sehingga dengan begitu diharapkan akan memberikan perspektif baru, tentang relasi antara negara dengan masyarakat dalam praktik moderasi beragama.

Sementara dari sisi temuan, penelitian ini berupaya menghadirkan data empiris, berkaitan dengan kebijakan bagaimana tersebut dinegosiasikan, diterjemahkan, dan diinternalisasi, oleh aktor lokal seperti Kementerian Agama

---

<sup>26</sup> Saiful Hadi, “*Strengthening Religious Moderation Among the People of Madura through Religious Mentoring Activities Based on Local Wisdom*,” *Jurnal Islam Nusantara* 8, no. 1 (3 Agustus 2024), hlm. 57–72, <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/551>.

Pamekasan, Kepala Kantor Urusan Agama, Kepala Desa dan tokoh Masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi *puzzle* kosong pada aspek implementasi kebijakan, tetapi juga memperkuat validitas kajian moderasi beragama, melalui pendekatan kontekstual dan berbasis realitas sosial di tingkat akar rumput.

### **E. Kerangka Teori**

Dalam setiap proses kebijakan publik, tahap implementasi merupakan aspek krusial yang menentukan tercapainya tujuan dari suatu program. Sebaik apa pun perumusan kebijakan, tanpa implementasi yang efektif, maka dampak kebijakan tidak akan dirasakan oleh masyarakat. Setiap proses kebijakan publik, tahap implementasi memegang peranan krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu program.

Kebijakan yang dipandang baik, tidak akan memberikan dampak nyata jika tidak diimplementasikan secara efektif di lapangan. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi kebijakan, menjadi aspek penting dalam penelitian kebijakan publik. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan dalam mengkaji implementasi kebijakan, terutama implementasi Kampung Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama Pamekasan, yaitu model implementasi kebijakan dari Edward III, sebab teori ini lebih aplikatif, terutama dalam menelanjangi kebijakan *Kampung Moderasi Beragama* (KMB) di Kabupaten Pamekasan.

#### **a. Analisis Implementasi Kebijakan**

Dalam kajian kebijakan publik, implementasi dipahami sebagai fase yang sangat krusial, dalam menjembatani keputusan politik, dengan realitas tindakan di

lapangan. Secara teoritis implementasi kebijakan tidak hanya dipandang sebagai proses melaksanakan keputusan pemerintah, namun implementasi kebijakan dipahami sebagai arena yang cukup kompleks, mulai dari aktor pelaksana, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial-politik yang melingkupi di mana kebijakan tersebut dijalankan.

Para ahli seperti Pressman dan Wildavsky, Van Meter dan Van Horn, Edwards III, menunjukkan bahwa variabel implementasi itu sendiri bersifat multidimensional dan saling memengaruhi, mulai dari kejelasan tujuan kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana, hingga dinamika kekuasaan dan nilai-nilai lokal. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan kebijakan, untuk menyesuaikan diri dengan konteks sosial yang berbeda-beda.

Dalam konteks program Kampung Moderasi Beragama di Pamekasan, menjadi sangat relevan sebab kebijakan tersebut, tidak hanya berkaitan dengan regulasi administratif, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan internalisasi nilai-nilai moderasi dalam masyarakat yang memiliki struktur sosial, budaya, dan religius yang kental. Dengan demikian, implementasi program semacam ini menuntut pemahaman teoritis yang komprehensif, agar dapat menilai bagaimana kebijakan beroperasi di tingkat lokal, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas kebijakan kampung moderasi itu sendiri.

Implementasi kebijakan memiliki beragam definisi, mulai dari penekanan dari segi proses, perilaku, serta sampai pada hubungan antara kebijakan dan

tindakan. Menurut Pressman dan Wildavsky, implementasi merupakan proses panjang yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan tindakan administratif, dimana keberhasilan sangat ditentukan oleh koordinasi antar lembaga yang mempunyai tanggung jawab atas kebijakan, seperti penurunan angka *stunting* dengan makanan bergizi gratis dan berbagai macam kebijakan yang lain.

Pressman dan Wildavsky menggambarkan implementasi kebijakan sebagai *“Implementation is the ability to forge subsequent links in a causal chain so as to obtain the desired results”*.<sup>27</sup> Pendapat ini sangat bergantung pada kemampuan menghubungkan setiap tahap pelaksanaan, tanpa terganggu oleh fragmentasi birokrasi. Namun, model ini dikritik karena reduksinya terhadap fenomena implementasi menjadi persoalan koordinasi semata.

Menurut Van Meter dan Van Horn, pemahaman tentang implementasi kebijakan, menekankan pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi pemerintah maupun swasta, untuk mencapai suatu tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan standar kinerja, sumber daya, hubungan antar organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik, seperti halnya dengan kucuran dana 200 T. ke bank HIMBARA oleh Kementerian Keuangan, untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di skala nasional.

Van Meter dan Van Horn dalam hal ini menekankan implementasi sebagai tindakan terarah, untuk mencapai tujuan kebijakan. *“Policy implementation*

---

<sup>27</sup> Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation* (University of California Press, 1984), xv.

*encompasses those actions by public and private individuals that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*".<sup>28</sup> Definisi ini memberi kerangka variabel yang lebih sistematis, tetapi dianggap terlalu linear karena berasumsi bahwa kebijakan selalu bergerak dari keputusan, menuju tindakan secara runtut.

Sementara itu Edwards III menekankan, bahwa implementasi kebijakan bergantung pada empat faktor utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Jadi ukuran kebijakan bisa dianggap berhasil jika empat faktor tersebut, mampu menjalankan tugasnya dengan benar, namun kebijakan akan gagal, jika di antara masing-masing faktor gagal menjalankan amanah yang sudah ditentukan oleh rumusan kebijakan yang sudah ditentukan.

Definisi yang ditawarkan oleh Edwards III nyatanya lebih operasional, melalui variabel implementasi yang konkret. Ia menyatakan bahwa *"Implementation is the stage of policy making between the establishment of a policy and its consequences for the people whom it affects"*.<sup>29</sup> Fokus Edwards pada komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, hal ini nyatanya memperjelas faktor-faktor teknis dalam implementasi. Tetapi kritik terhadap pendekatan ini muncul karena dianggap mengabaikan dinamika politik dan konflik kepentingan yang terjadi di ruang publik.

---

<sup>28</sup> Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework,"* *Administration & Society* 6, no. 4 (1975), hlm. 447. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.

<sup>29</sup> George C. Edwards, *Implementing Public Policy* (Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 1.

Mazmanian dan Sabatier memandang implementasi kebijakan, sebagai upaya untuk menjembatani tujuan kebijakan dengan realitas lapangan, melalui seperangkat kegiatan yang dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan, seperti variabel institusional, dan faktor-faktor eksternal. Melalui pendekatan analisis yang lebih kompleks, hal ini bisa dipahami dari kalimat berikut, yaitu *“Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute, in which goals, objectives, and the structure of the program are specified”*.<sup>30</sup> Meskipun definisi ini menekankan hubungan antara desain kebijakan dan proses pelaksanaan.

Namun Grindle memberikan tawaran baru tentang implementasi kebijakan, yaitu serangkaian proses interaksi antara kebijakan dan konteks administratif, politik, serta sosial yang secara langsung memengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Dalam karyanya mengungkapkan bahwa *“Implementation is essentially a political and administrative process in which the content of policy and the context of its implementation interact”*.<sup>31</sup> Pendekatan implementasi ini dianggap lebih realistis dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara.

Dari berbagai macam definisi yang dijelaskan tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada satu model pun yang sepenuhnya komprehensif, sehingga pemilihan

---

<sup>30</sup> Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, *Implementation and Public Policy* (Scott, Foresman, 1983), hlm. 20.

<sup>31</sup> Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton University Press, 2017), hlm 10.

kerangka teori untuk penelitian harus mempertimbangkan karakter, tujuan, serta lingkungan kebijakan yang sedang dikaji.

Pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh perspektif, menjadi penting ketika kebijakan diterapkan dalam ruang sosial yang berbeda dan rentan terhadap dinamika sosial, seperti program Kampung Moderasi Beragama di Pamekasan. Program tersebut tidak hanya menuntut kejelasan tujuan dan desain kebijakan, tetapi juga memerlukan dukungan aktor lokal, kapasitas kelembagaan, komunikasi yang efektif dengan masyarakat, serta sensitivitas terhadap nilai-nilai budaya Madura yang kuat.

Dengan demikian, kerangka teoritis implementasi kebijakan, membantu menjelaskan bahwa keberhasilan Kampung Moderasi Beragama di Pamekasan, sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan konten kebijakan, dengan realitas sosial di lapangan, serta membangun komitmen para pelaksana, dan memastikan bahwa nilai-nilai moderasi dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari.

b. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Dalam konteks Pamekasan, penting untuk menelaah kembali, bagaimana komunikasi kebijakan Kampung Moderasi Beragama (KMB) dijalankan, di tengah masyarakat yang religius dan kuatnya tradisional lokal, apakah sumber daya pendukungnya memadai, serta bagaimana sikap para pelaksana dari aparat desa dan tokoh agama, serta secara struktur birokrasi apakah mempunyai kemampuan, dalam

mengkomunikasikan program *Kampung Moderasi Beragama* (KMB) tersebut ke khalayak umum.

Dalam teorinya Edward III mengungkapkan, bahwa Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial, dalam proses perumusan kebijakan setelah kebijakan ditetapkan secara resmi, baik melalui pengesahan undang-undang, penerbitan peraturan pemerintah, keputusan yudisial, maupun regulasi administratif lainnya. Tahapan ini mencakup proses penerapan kebijakan, hingga tercapainya dampak nyata, terhadap kelompok sasaran atau masyarakat umum yang menjadi objek kebijakan tersebut.<sup>32</sup>

Siklus implementasi kebijakan pada dasarnya menjadi penentu, apakah tujuan normatif dan operasional dari suatu kebijakan, dapat diwujudkan secara efektif di tingkat pelaksana. Dalam konteks studi kebijakan model implementasi George C. Edward III, menjadi pilihan utama penulis, sebagai kerangka analisis yang komprehensif, untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program. Edward pada dasarnya menekankan empat variabel utama dalam analisis kebijakan, antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang secara simultan berperan penting sebagai determinan implementasi kebijakan.<sup>33</sup>

Model implementasi kebijakan Edward III, sangat relevan untuk menganalisis kebijakan Kampung Moderasi Beragama di skala lokal. Kampung

---

<sup>32</sup> George C. Edwards, *Implementing Public Policy* (Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 1.

<sup>33</sup> Yurensi Laary dkk., “Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat,” *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 120 (2022), hlm. 63. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/42250>.

Moderasi Beragama merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan memperkuat pemahaman keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan nilai kebangsaan, melalui penguatan kapasitas aktor lokal seperti pemerintah desa, penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan warga. Dengan menggunakan model Edward III, proses implementasi kebijakan kampung moderasi, dapat dikaji secara lebih sistematis, mulai dari bagaimana pesan kebijakan disosialisasikan, bagaimana sumber daya dialokasikan, bagaimana sikap dan komitmen pelaksana terbentuk, hingga bagaimana struktur birokrasi dan mekanisme koordinasi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program di tingkat desa.

George C. Edward III menawarkan model analisis yang menekankan, pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi secara sistematis. Model ini memandang bahwa efektivitas implementasi, dipengaruhi oleh serangkaian variabel yang bekerja secara terikat, sehingga kegagalan pada salah satu aspek dapat berimplikasi kegagalan kebijakan. Dengan demikian sebelum menelaah lebih jauh faktor-faktor tersebut, alangkah baiknya terlebih dahulu, memahami dasar pemikiran Edward III yang menempatkan implementasi, sebagai tahap strategis dalam siklus kebijakan publik, antara lain sebagai berikut:

*Pertama Komunikasi (Communication)*, variabel ini sangat fundamental dalam implementasi kebijakan, sebab komunikasi menjadi variabel penentu, apakah pesan kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana atau kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Efektivitas implementasi sangat dipengaruhi oleh instruksi kebijakan dan transmisi pesan kebijakan yang jelas, tidak ambigu, dan

konsistensi antar lembaga pelaksana kebijakan. Dalam perspektif Edward III, komunikasi mencakup tiga aspek penting, yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi.<sup>34</sup>

Dari tiga aspek yang disinggung di atas, merupakan serangkaian cara, bagaimana komunikasi dilakukan, mulai dari kejelasan informasi, untuk memastikan bahwa setiap instruksi bisa dipahami secara jelas, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Adapun konsistensi diperlukan, agar tidak terjadi kontradiksi antar level pemerintahan yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Sedangkan Transmisi merujuk pada bagaimana informasi kebijakan disampaikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana, melalui jalur birokrasi yang tepat. Ketika komunikasi berjalan efektif, pelaksana kebijakan akan mampu memahami tujuan kebijakan secara utuh dan benar.

*Kedua* Sumber daya (*Resources*), merupakan prasyarat operasional dari keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III kebijakan yang baik sekalipun, tidak akan berjalan efektif, jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai, sumber daya ini bisa disebut sebagai bahan bakar kebijakan. Adapun sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia yang kompeten, sumber daya finansial untuk membiayai program, serta sarana dan prasarana sebagai pendukung teknis, terakhir sumber daya kewenangan yang berupa legitimasi dan kerangka regulatif bagi pelaksana.

Kekurangan sumber daya dalam salah satu aspek, sering kali menjadi penyebab utama terhambatnya implementasi di tingkat lokal, oleh sebab itu

---

<sup>34</sup> Riant Nugroho, *Public Policy 6* - Edisi Revisi (Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 363.

keberhasilan suatu kebijakan, sangat ditentukan oleh kapasitas lembaga pelaksana dalam menyediakan dan mengelola sumber daya yang ada. Benang merah yang dapat dipahami melihat pentingnya kecukupan sumber daya manusia, finansial, sarana, dan kewenangan sebagai modal dasar untuk menggerakkan kebijakan, bahwa kebijakan yang dirumuskan dengan baik sekalipun, tetap berisiko gagal jika tidak ditopang oleh sumber daya yang memadai.

*Ketiga Disposisi (Disposition of Implementers)*, dalam hal ini merujuk pada sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan itu sendiri, dalam menjalankan tugasnya. Edward III berpendapat bahwa meskipun suatu kebijakan telah dirancang dengan baik, didukung oleh sumber daya yang cukup, implementasi dapat tetap gagal, apabila para pelaksananya tidak memiliki kemauan yang kuat untuk menjalankan kebijakan tersebut.<sup>35</sup> disposisi yang dimaksud oleh Edward yaitu, mencakup komitmen, pemahaman, dan sikap para pelaksana terhadap kebijakan.

Disposisi sendiri mencakup beberapa aspek, antara lain komitmen, pemahaman terhadap kebijakan, tidak kalah pentingnya, yaitu tingkat kepatuhan pelaksana terhadap tujuan program itu sendiri. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu sikap dari pelaksana sendiri, jika pelaksana kebijakan setuju dengan isi kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati dan sukarela, akan tetapi jika pelaksana

---

<sup>35</sup> Akil Rahmatillah, "Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward Iii," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 8, no. 3 (2023), <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/25686>.

kebijakan berbeda pandangan dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak tantangan dan masalah.<sup>36</sup>

*Keempat*, Struktur birokrasi, yaitu mencakup desain organisasi, mekanisme kerja, pembagian tugas, prosedur operasional, dan pola koordinasi antara pelaksana. Menurut Edward III struktur birokrasi yang terlalu hierarkis, kaku, atau terfragmentasi, dapat menciptakan hambatan implementasi, karena memperlambat aliran informasi dan proses pengambilan keputusan, dari masalah yang sering kali tidak bisa diperkirakan yang ada di lapangan, akan tetapi sebaliknya, jika struktur birokrasi yang jelas, sederhana, serta didukung oleh *Standard Operating Procedures* (SOP), akan mempermudah pelaksana menjalankan kebijakan secara terarah dan konsisten.<sup>37</sup>

Kerangka analisis Edward III memungkinkan peneliti menilai secara objektif, akan melihat sejauh mana kebijakan tersebut berjalan sesuai harapan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat, maupun pendukung dalam realisasi kebijakan di tingkat lokal. Dengan pendekatan Edward III, diharapkan analisis implementasi kebijakan KMB, dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan peluang, dalam membangun moderasi beragama di daerah yang rentan terhadap konflik keagamaan.

Dalam konteks penelitian ini, teori Edward III digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan *Kampung Moderasi Beragama* (KMB) di Kabupaten Pamekasan diimplementasikan, serta faktor-faktor apa saja yang

---

<sup>36</sup> Syahrudin., *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus* (Bandung: Nusamedia, 2019), 62.

<sup>37</sup> Syahrudin., *Implementasi Kebijakan Publik*, 63.

memengaruhi keberhasilannya, dalam membangun harmoni sosial dan mengatasi konflik berbasis agama.

## **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya metode penelitian berfungsi sebagai pisau analisis, serta langkah-langkah yang akan diambil oleh peneliti, dalam menyusun suatu penelitian, sehingga dengan begitu metode penelitian berisi serangkaian proses, cara dalam mengumpulkan data, untuk menghasilkan temuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, setidaknya penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan, merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan melakukan wawancara kepada Kementerian Agama Pamekasan, terkait dengan kebijakan Kampung Moderasi Beragama (KMB). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Adapun langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini, akan peneliti jelaskan dalam poin-poin berikut:

## 2. Sumber Data

Sumber data berguna untuk melihat, objektivitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam mencari dan memilih data. Adapun sumber data yang penulis jelaskan sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, yaitu verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh informan, sumber data primer di kota Pamekasan terkait Kementerian Agama Pamekasan. Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari wawancara dan dokumentasi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan, serta diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan dan bahan-bahan yang dapat dijadikan rujukan, yakni berupa pendapat para ahli tentang moderasi beragama dan Kampung Moderasi Beragama.

## 3. Teknik pengumpulan data

### a. Interview (wawancara)

Proses interview untuk mengetahui secara mendalam mengenai latar belakang, implementasi, serta respons terhadap

kebijakan Kampung Moderasi Beragama (KMB) di Kabupaten Pamekasan. Pada dasarnya penelitian ini mengalami banyak tantangan, terutama dalam proses administrasi, sebab sebelum melakukan wawancara, peneliti diharuskan terlebih dahulu melayangkan surat permohonan wawancara, tidak berhenti di situ, peneliti harus menunggu sampai ada panggilan, bisa dibayangkan proses wawancara bisa dilakukan seminggu atau dua minggu setelah surat diterima, dan pertanyaan penelitian dikirimkan, selain itu proses penelitian berjalan dengan lancar.

Bahkan peneliti tidak serta merta bisa masuk secara leluasa untuk melakukan wawancara, tidak jarang proses wawancara harus melibatkan banyak pihak untuk mendapatkan koneksi langsung, supaya bisa melakukan wawancara atau tidak, sebab tidak jarang surat permohonan penelitian yang masuk, hanya sekadar jadi hiasan tidak ada tindak lanjutnya. Perlu digarisbawahi, bahwa tidak semua responden seperti itu, ada pula aksesnya dipermudah, bahkan sampai dikatakan kapan saja bisa melakukan wawancara.

Banyak kejadian menarik dan terkesan pula, sebab responden tidak mau berbicara langsung, tapi lewat tulisan, sehingga peneliti harus mengirimkan draf wawancara, ada pula yang terlalu bersemangat, sebab seakan satu Kantor Urusan Agama yang membarengi peneliti. Dalam hal ini, seakan peneliti harus

berhadapan dengan banyak orang sekaligus dan memilih pertanyaan yang dianggap tidak sampai menyinggung responden.

b. Respons Tertulis Narasumber

Teknik respons tertulis narasumber, dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada narasumber, untuk dijawab secara tertulis. Jawaban tersebut kemudian dikirim kembali kepada peneliti, dalam bentuk dokumen tertulis, seperti fail PDF. Hal ini dilakukan sebab ada keterbatasan waktu, kondisi, atau situasi yang tidak memungkinkan dilaksanakannya wawancara secara langsung.

Teknik ini dilakukan sebab, narasumber tidak berminat melakukannya secara langsung, karena banyak kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu alasan narasumber takut lupa atau salah menjawab, jika dilakukan secara langsung, sehingga teknik respons tertulis menjadi pilihan utama untuk menjaga orisinalitas data yang didapatkan peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan serta menganalisis dokumen, baik gambar maupun elektronik yang dirasa penting dalam menyelesaikan penelitian. Adapun dokumen yang dapat peneliti akses yaitu data BPS yang berguna untuk melihat struktur sosial, pendidikan dan jumlah agama dan pemeluk agama di Kabupaten Pamekasan, serta pertumbuhan penduduk dan banyaknya tempat ibadah.

Dokumentasi acara dari program kebijakan Kampung Moderasi Beragama yang dilakukan di berbagai tempat, serta kebijakan Kampung Moderasi Beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian. Kerangka teoritik menyangkut pola pikir atau kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya yang mengorganisasikan penyusunan. Pembahasan dalam bab pertama ini akan dijelaskan secara rinci per sub-bab.

Bab *Kedua*, merupakan pembahasan awal tema penelitian. Pada bab ini pembahasan diawali dengan gambaran umum tentang lokasi penelitian. Bab ini

berguna sebagai bahan observasi untuk melihat secara langsung geografis Kabupaten Pamekasan, konflik antaragama dan tinggi rendahnya pendidikan masyarakat Pamekasan.

Bab *Ketiga* Menguraikan bagaimana kebijakan Kampung Moderasi Beragama yang dilaksanakan di Pamekasan, berkaitan dengan peran pemerintah daerah Pamekasan, sebagai eksekutor kebijakan, identifikasi kendala dalam pelaksanaan program kebijakan Kampung Moderasi Beragama di Pamekasan.

Bab *Keempat*, merupakan uraian tentang Analisis Kebijakan Kampung Moderasi Beragama berdasarkan kerangka teori Implementasi yang dipopulerkan oleh George C. Edward III.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup. Di dalam bab ini memuat kesimpulan, berisi tentang temuan atau jawaban atas rumusan masalah, kritik serta saran-saran berisi tentang saran pada para peneliti selanjutnya, sehingga dapat berpartisipasi terhadap perkembangan *khazanah* literatur keislaman, bab ini ditutup dengan pencantuman daftar pustaka, atau rujukan-rujukan yang penulis gunakan dalam penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka benang merah yang dapat diambil, berkaitan dengan implementasi kebijakan Kampung Moderasi Beragama (KMB) di Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

*Pertama* bahwa agenda kebijakan Kampung Moderasi Beragama, merupakan kebijakan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama, sebagai respons terhadap dinamika sosial-keagamaan. Kebijakan tersebut bersifat *top-down*, karena merupakan mandat dari pemerintah pusat yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah, melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Sedangkan agenda utama dari kebijakan tersebut, yaitu upaya membangun kesadaran masyarakat, mengenai pentingnya moderasi beragama melalui internalisasi nilai-nilai toleransi, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, serta penghargaan terhadap kearifan lokal.

*Kedua* dari aspek mekanisme implementasi kebijakan Kampung Moderasi Beragama di Kabupaten Pamekasan, dilaksanakan melalui struktur kelembagaan yang dibentuk oleh Kementerian Agama, dengan melibatkan Kelompok Kerja (Pokja), Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, pemerintah desa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan sumber daya anggaran, serta struktur birokrasi yang cenderung bersifat administratif dan berpusat pada negara (*state-centered*).

*Ketiga*, implementasi Kampung Moderasi Beragama di Kabupaten Pamekasan, menunjukkan bahwa program ini telah berjalan, seperti adanya program sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama, tokoh masyarakat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), menjadi sarana dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat. Meskipun demikian, pencapaian program masih bersifat administratif, sehingga evaluasi yang dilakukan cenderung berfokus pada pelaporan kegiatan (*activity-based*), daripada pengukuran dampak sosial yang lebih mendalam, akibatnya, implementasi program lebih menghasilkan rutinitas kegiatan administratif dibandingkan perubahan sosial yang signifikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian berkaitan dengan tema implementasi kebijakan Kampung Moderasi Beragama di Kabupaten Pamekasan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

*Pertama*, hasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan Kampung Moderasi Beragama di Pamekasan, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga dengan demikian Kementerian Agama Pamekasan, perlu memperkuat strategi implementasi kebijakan dengan meningkatkan kapasitas pelaksana program, memperluas sosialisasi kepada masyarakat, serta menyediakan dukungan sumber daya yang lebih memadai agar program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

*Kedua*, peneliti mengindikasikan bahwa keberhasilan program moderasi beragama di tingkat lokal terutama di Pamekasan, tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan dari pemerintah pusat, namun juga ditentukan oleh kondisi sosial budaya masyarakat, serta pengaruh otoritas keagamaan di tingkat lokal, sebab pelaksanaan program Kampung Moderasi Beragama, perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif, supaya nilai-nilai moderasi beragama dapat diinternalisasikan secara lebih efektif.

*Ketiga*, Adapun saran peneliti untuk peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan evaluasi kebijakan yang lebih mendalam atau melalui studi komparatif antar daerah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan moderasi beragama di Indonesia, supaya ada pertukaran gagasan dalam implementasi Kampung Moderasi Beragama khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Haidar, dkk. "Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer." Diakses 11 November 2024. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id>
- A'la, Abd, dan Ahwan Mukarrom. "Power-Knowledge Relations of The Elder and The Younger Madurese Muslim Scholars in Propagating Islamism in Madura: A Counter-Narrative." *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 10, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2020.10.1.81-109>.
- Amal, M. Khusna. "The Role of Islamic Religious Higher Education in the Revitalization of Religious Moderation in Indonesia." *Dialogia* 19, no. 2 (2021): 293–325. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v19i2.3327>.
- Ariyani, Yan, Mery Atika, dan Rekananda Ratu Bianca. "Peran Blater dan Identitas Budaya Menjaga Tradisi di Tengah Globalisasi". 2024.
- Azka, Sofiyudin, dan UIN Sunan Ampel Surabaya. *Analisis Kebijakan Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam: Tinjauan Mendalam Terhadap Implikasi Dan Tantangan*. 09 (2024). <https://doi.org/10.23969/jp.v9i1.13131>.
- "Diiringi Takbir, Massa Bakar Kedai Bukit Bintang di Pamekasan." Diakses 9 Maret 2026. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201005132718-20-554475/diiringi-takbir-massa-bakar-kedai-bukit-bintang-di-pamekasan>.
- Edwards, George C. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, 1980.
- Fahmi, Ach Syafiq, Mohammad Ali Al Humaidy, dan Sahrul Romadhon. "Kampung Moderasi Beragama Polagan: Strategi Mewujudkan Masyarakat Moderat Di Pamekasan." *Poros onim: Jurnal Sosial Keagamaan* 5, no. 1 (2024): 41–52. <https://www.e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim/article/view/1198>.
- Fahmi, Ach Syafiq, Mohammad Ali Al Humaidy, Sahrul Romadhon, dan Maimun. "Kampung Moderasi Beragama Polagan: Strategi Mewujudkan Masyarakat Moderat Di Pamekasan." *Poros onim: Jurnal Sosial*

- Keagamaan* 5, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v5i1.1198>.
- Fahrudin, Ahmad Hanif, Mo'tasim Mo'tasim, Ifa Nurhayati, Rasyidin Rasyidin, dan Mufiqur Rahman. "Pembinaan Kampung Moderasi Beragama di Desa Tokerbuy Pamekasan Madura." *community development journal : jurnal pengabdian masyarakat* 5, no. 5 (2024): 8584–89. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.34283>.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press, 2017.
- Hadi, Saiful. "Strengthening Religious Moderation Among the People of Madura through Religious Mentoring Activities Based on Local Wisdom." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 8, no. 1 (2024): 1. <https://jurnalnu.com/index.php/as/article/view/551>.
- Haluti, Farid, Loso Judijanto, Apriyanto Apriyanto, Hanoch Herkanus Hamadi, Dahlan Lama Bawa, dan Kalip Kalip. *Moderasi Beragama : Menciptakan Suasana Kondusif Keberagaman Agama di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Hannan, Abd. "Penguatan Moderasi Beragama Di Madura Melalui Jejaring Sosial Keagamaan Pesantren." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 8, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v8i1.175>.
- Hefni, Moh. (*Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarkhi Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura*). no. 1 (2007).
- Indriani, Umi, Syamsir, Niken Najmi Zura, dkk. "Dinamika Hubungan Sosial Dan Budaya Dalam Implementasi Kebijakan Publik di Kota Padang." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025): 5. <https://doi.org/10.62281/v3i5.1824>.
- Islamy, Athoillah, dan Adib Susilo. "Kosmopolitanisme Islam Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i2.412>.

- Jannah, Annisa Nurul, dan Muhammad Turhan Yani. “*Aktualisasi Moderasi Beragama Sebagai Wujud Semangat Bhinneka Tunggal Ika Pada Masyarakat Multietnis Di Kampung Ampel, Kota Surabaya.*” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 2, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.572349/relinesia.v2i2.698>.
- “Kemenag Pamekasan Mengembangkan Dan Menguatkan Kampung Moderasi.” Diakses 21 Oktober 2024. <https://kemenagpamekasan.com>
- Laary, Yurensi, Femmy Tulusan, dan Salmin Dengo. “Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.” *Jurnal Administrasi Publik* 8, no. 120 (2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/42250>.
- Lestari, Dwi Indah, Heri Kurnia, dan Hendri. “*Kearifan Lokal Suku Madura Dalam Menjaga Tradisi Nilai Sosial Dan Identitas Budaya Modern.*” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 3, no. 2 (2025): 2. <https://doi.org/10.61476/etqpm419>.
- Lubis, Hisnuddin, dan Nelly Rohmatillah. “*Komodifikasi Otoritas Kiai Dalam Kontestasi Politik (Studi Komodifikasi Otoritas Kiai Di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan).*” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 3 (Mei 2019): 57. <https://doi.org/10.17977/um021v3i2p57-64>.
- Madura, Kabar. *Masjid di Pamekasan Ditutup Paksa karena Dianggap Melukai Warga* | *Kabar Madura*. News. 25 Januari 2023. <https://kabarmadura.id>.
- Masyhud, Mustain. “*Patologi Sosio-Teologis: Kekerasan Atas Nama Agama.*” *The Sociology of Islam* 5, no. 2 (2022): 156–69. <https://doi.org/10.15642/jsi.2022.5.2.156-169>.
- Maufiroh, Salamatul, Mohammad Ali Al Humaidy, dan Harisah Harisah. “*Implementasi Nilai Moderasi Dalam Praktek Pembangunan Wisata Religi ‘Batu Ampar’ Di Pamekasan.*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14926>.
- Mazmanian, Daniel A., dan Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman, 1983.

- Meter, Donald S. Van, dan Carl E. Van Horn. *“The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.”* Administration & Society 6, no. 4 (1975): 445–88. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- Munif, M., Mujamil Qomar, dan Abd Aziz. *“Kebijakan Moderasi Beragama Di Indonesia.”* Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam 6, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.58401/dirasah.v6i2.935>.
- Muryadi, Drs, dan Drs Sukaryanto. *“Negara Madura: Sejarah Pembentukan Hingga Penyelesaiannya Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”* Other. Universitas Airlangga, 2005. <http://lib.unair.ac.id>.
- Nugroho, Riant. *Public Policy 6 - Edisi Revisi*. Elex Media Komputindo, 2020.
- Nurhayati, Ifa, Mumtahanah Mumtahanah, Sumiati Sumiati, Putie Maharani Basa, Damanhuri Damanhuri, dan Mufiqur Rahman. *“Pembinaan kampung moderasi beragama pada masyarakat pesisir di Madura.”* Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 5 (2023): 9922–26. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/20845>.
- Pamekasan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *“Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2025.”* Diakses 17 Desember 2025. <https://pamekasankab.bps.go.id>
- “Pedoman Kampung Moderasi Beragama 2023”* Diakses 21 Februari 2026. <https://id.scribd.com/document/651214927/pdf-kepdiren-137-2023-pembentukan-kmb-compress>.
- “Pemerintah Kabupaten Pamekasan.”* Diakses 6 Desember 2025. <https://pamekasankab.go.id/sejarah>.
- “Perintisan Kampung Moderasi Beragama Kabupaten Pamekasan.”* Diakses 21 Oktober 2024. <https://kemenagpamekasan.com>.
- Permata, Ahmad-Norma. *Muslim dan Kristen di Surakarta: Kajian Sosiologis Hubungan Antar-Agama*. t.t. Diakses 28 Mei 2025. <https://www.academia.edu/2969062>
- Pressman, Jeffrey L., dan Aaron Wildavsky. *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland; Or, Why It’s Amazing That Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic*

- Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Foundation*. University of California Press, 1984.
- Rahmatillah, Akil. “Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 8, no. 3 (2023). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/25686>.
- “Ratusan Warga Rusak dan Bakar Kafe di Pamekasan.” Diakses 18 Desember 2024. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6920762>.
- “Ribuan Warga Rusak dan Bakar Lokasi Wisata di Pamekasan, Ini Faktanya.” Diakses 18 Desember 2024. <https://regional.kompas.com/read/2020/10/05/15450001>.
- Rismawati, Shinta Dewi, Siti Qomariyah, Happy Sista Devy, Nurul Maisyal, dan Qurrota A’yun. “The Legal Politics Of Religious Moderation In Indonesia: Responsive Or Repressive?” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 4 (2021): 4. <https://www.abacademies.org/articles/the-legal-politics-of-religious-moderation-in-indonesia-responsive-or-repressive-10805.html>.
- Rohma, Dika Purnama Aulia, dan Kunti Wildana Anjuma. “Class Of Religion: Representasi Moderasi Beragama Di Era Digital.” *Prosiding AnSoPS (Annual Symposium on Pesantren Studies)* 3 (Desember 2024): 10–20. <https://proceeding.iainkediri.ac.id/index.php/ansops/article/view/76>.
- Rohmanu, Abid. *Reinterpretasi Jihad : Relasi Fikih dan Akhlak*. Ponorogo, 2017. <https://repository.iainponorogo.ac.id/72/>.
- Ruslan, Idrus. *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia*. Arjasa Pratama, 2020.
- Siswadi, Gede Agus, Ida Bagus Gede Candrawan, dan I. Dewa Ayu Puspadewi. “Membangun Nilai-Nilai Moderasi Beragama Di Tengah Masyarakat Plural: Sebuah Pendekatan Filsafat Agama.” *Widya Aksara : Jurnal Agama Hindu* 29, no. 2 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.54714/widyaaksara.v29i2.280>.

- Sulisman, Alya Nurayu, dan Titi Stiawati. “*The Imperative Of Establishing Kampung Moderasi Beragama As A Strategy For Neighborhood-Based Community Empowerment.*” *Komunitas* 14, no. 2 (2023): 125–36. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v14i2.9023>.
- Supriyanti, Noviyanti, dan Ahmad Pratikno. “*The Role of Prince Ronggosukowati in the History and Culture of Pamekasan.*” *Pantun: Jurnal Ilmiah Seni Budaya* 9 (Desember 2024): 152–62. <https://doi.org/10.26742/pantun.v9i2.3601>.
- Sutrisno, Andri, dan Fitrah Sugiarto. “*The Role Of The Religious Youth Harmony Forum (Fkpub) In Improving Local Wisdom-Based Religious Moderation In Pamekasan City.*” *Khatulistiwa* 12, no. 1 (2022): 37–56. <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v12i1.2290>.
- Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia, 2019.
- Topan, Ali. “*Potret Kehidupan Umat Beragama (Studi Kasus Penolakan Wahabi-Salafl di Pamekasan Madura 2010—2023).*” *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2024): 67–86. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v6i1.12589>.
- Zamzami, Mukhammad, Nur Hidayat Wakhid Udin, dan Ahmad Fathan Aniq. *From Religious Symbolism to Authoritarianism Abd A’la*. 12, no. 02 (2018).